

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 04 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH
(Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**DWI FITRIANI
NPM : 1621020492**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Pembimbing II : Frenki, M. Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh yang ada di kota Bandar Lampung. Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah field research (lapangan). Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 ini masih belum bisa diterapkan sebaik mungkin sebagaimana mestinya, dengan adanya faktor kendala covid-19 yang menjadi kendala lancarnya penerapan tugas oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung seperti kinerja bidang perumahan Dinas Bidang Perumahan dan Permukiman Kota bandar Lampung sampai dengan bulan September tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak signifikan di sebabkan pengaruh dampak Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini yang berdampak pada *refocusing* anggaran daerah maupun pusat. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* dalam konsep siyasah dusturiyah adanya suatu peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fitriani
NPM : 1621020492
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Desember 2020
Penulis,



Dwi Fitriani
1621020492

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung)*

Nama: Dwi Fitriani

NPM: 1621020492


Jurusan: Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas: Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimonagoryahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munagoryah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

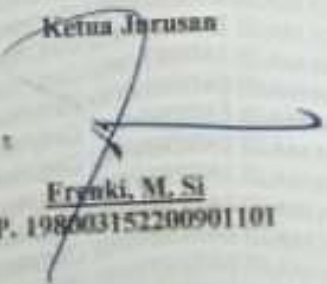
Pembimbing I


Drs. Henry Iwansyah, M.A
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II


Frenki, M. Si
NIP. 1980031522009011017

Ketua Jurusan


Frenki, M. Si
NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Indro Suroso Sekeloa I Bandar Lampung Telp. (0722) 703288

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh* Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung)" disusun oleh Dwi Fitriani, NPM: 1621020492 program studi Syariah Syar'riyah (Hukum Tata Negara). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 30 Desember 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Sekretaris : Dani Amran Halim, S.H., M.H

Penguji I : Eti Kartini, S.H., M.Hum

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji III : Fredi, M.Si.

Dekan,
Fakultas Syariah
Dr. H. H. Hairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al – A’raf (7) : 56)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Poniman dan Ibu Jumiati, dan Ibu Poniah atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kakakku Eli Purwati, adikku Zahra Septiani dan Dian Saputra sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dwi Fitriani seorang anak perempuan yang dilahirkan pada Tanggal 25 Desember 1998 di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur yang merupakan putri kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Poniman dan Jumiati. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Guna Dharma di Dagangan Kabupaten Madiun, lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Dagangan, lulus pada tahun 2010. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di Madrasah Tsanawiyah Mathla'ul Anwar Gisting Bawah, lulus pada tahun 2013. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Gisting Bawah, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasaah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra Fakultas Syari'ah maupun ekstra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan aktif mengikuti organisasi PMII Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Frenki, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, kepada perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang di butuhkan.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
11. Kepada orang tua tercinta Ayahanda Poniman dan Ibu Jumiati atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing

penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

12. Kakakku Eli Purwati, Adik Zahra Septiani dan Dian Saputra tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
13. Sahabat ku Nindi Aulhaq, Kasma Boty, Hanifa Sekar Latih.
14. Sahabat PMII angkatan 16 beserta Senior yang telah memberikan pengalaman, kenangan, dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi dan beradaptasi.
15. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas G yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Rekan-rekanku terkhusus angkatan 2016 di UIN Raden Intan Lampung (Deni Yolanda, Desmawati, Intan Novita Sadewa).
17. Sahabat KKN ku di kelompok 42 gelombang II.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 11 Desember 2020
Penulis

Dwi Fitriani
1621020492

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Kebersihan Lingkungan	
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	16
2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Kebersihan Lingkungan Menurut Fiqh Siyasah ..	27
B. Kebersihan Lingkungan Menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh	33
1. Pengertian Kebersihan Lingkungan	33
2. Pengertian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	35
3. Kriteria dan Tipologi Perumahan dan Pemukiman Kumuh	37
C. Tinjauan Pustaka.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Pemukiman Bandar Lampung.....	46
B. Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 4	

Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	60
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Tugas Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2017	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda No. 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami terkait judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Fiqh Siyasah yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mutjahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam,² untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³

¹Deparemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Semarang: CV Diponegoro, 2001), h. 6.

³Ibnu Mazhur, *Lisan al-'Arab, Jus 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Bandar Lampung untuk pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh yang ada di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian yang membahas tentang implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perumahan kumuh dan ditinjau menurut Fiqih Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong untuk memilih judul skripsi:

1. Alasan Objektif

- a. Setiap perumahan dan pemukiman layak huni membutuhkan sarana dan prasana dalam upaya peningkatan kualitas perumahan, hal ini diatur oleh perundang-undangan. Namun di Kota Bandar Lampung terdapat perumahan yang tidak memenuhi sarana dan

⁴Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

prasarana, akibatnya perumahan dan pemukiman menjadi kumuh. Hal inilah yang menjadi alasan untuk meneliti masalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini merupakan bagian dari kajian pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Adanya literatur yang tersedia dan didukung data lapangan yang cukup sehingga di perkirakan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan dengan tempat yang di mana manusia itu bernaung dan tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar di samping kebutuhan sandang dan pangan. Pada hakikatnya fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital, tanpa tempat tinggal maka manusia tidak akan dapat hidup dengan layak.⁵

⁵Suparno Sastra, Endy Marlina, *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 2.

Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan pemukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan pemukiman. Peraturan perundang-undangan antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 1992, Undang-undang itu menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana,⁶ selain merupakan kebutuhan dasar, lingkungan juga menjadi dasar pokok pendukung kesehatan, maupun kenyamanan. Seiring perkembangan dunia, perebutan atas pendirian rumah semakin pesat baik dari masyarakat pindahan maupun masyarakat tetap di daerah tersebut. Sehingga mereka mengesampingkan sarana, prasana dan kualitas yang harus di miliki dalam suatu lingkungan perumahan yang menyebabkan terjadinya kekumuhan di dalam lingkungan.

Selain menjadi kebutuhan penting namun sebuah lingkungan perumahan juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menjaga keserasian lingkungan. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 04 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pembangunan sektor perumahan dan pemukiman. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai pemukiman tempat

⁶*Ibid*, h. 4.

tinggal yang dilengkapi dengan lingkungan bersih serta sarana dan prasarana.⁷

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya.

Baik itu di daerah perkotaan merupakan suatu masalah yang menyertai lajunya pembangunan yang sedang dilaksanakan, permasalahan-permasalahan ini pada gilirannya akan menimbulkan akibat-akibat terhadap pemukiman manusia dan lingkungan hidup, hal ini terlihat dengan adanya penambahan penduduk dan menciutnya tanah untuk pemukiman.⁸

Permasalahan pemukiman yang memburuk di daerah perkotaan Indonesia, dicerminkan oleh adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan perumahan yang besar, tidak memadai fasilitas-fasilitas kehidupan yang tersedia terhadap pemenuhan hidup minimum, Salah satu sifat Urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai Urbanisasi Semu (*Pseudo Urbanization*) yang dapat diartikan bahwa Urbanisasi Semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada Urbanisasi Semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan.⁹

⁷*Ibid*, h. 4.

⁸Gatot Murniatmo, *pola pemukiman rumah inti dan dampaknya dimagelang*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), h. 7.

⁹*Ibid*, h. 10.

Begitu juga dalam agama Islam, kebersihan sangat diperhatikan baik secara fisik maupun jiwa serta secara tampak maupun tidak tampak. Kita juga dianjurkan agar memelihara dan menjaga sekeliling lingkungan dari kotoran agar tetap bersih. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian Al-Sunnah Al-Nabawiyya terhadap kebersihan muncul dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

1. Sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah swt.
2. Kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan.
3. Kebersihan itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.
4. Kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain.¹⁰

Kebersihan lingkungan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6:

¹⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h.365-367.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan kamu susah tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu semoga kamu bersyukur”.

Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di muka bumi. Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan menjadi satu dengan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan hijau yang masih alami akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sesuai dengan fiman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikambulkan). Sesungguhnya rahmat amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.¹¹

¹¹Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah,1990), h. 230.

Seiring perkembangan zaman, perebutan atas pendirian rumah semakin pesat baik dari masyarakat pindahan maupun masyarakat tetap di daerah tersebut. Sehingga mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan, sarana dan prasana yang harus dimiliki dalam suatu lingkungan perumahan yang menyebabkan terjadinya perumahan kumuh.

Pemukiman kumuh dapat dijumpai pada seluruh kota-kota besar di Indonesia, permasalahan pemukiman yang memburuk di daerah perkotaan Indonesia dicerminkan oleh adanya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kepadatan perumahan yang besar dan tidak memadai fasilitas-fasilitas kehidupan yang tersedia terhadap pemenuhan hidup yang minimum.¹²

Kota Bandar Lampung salah satu kota di Indonesia yang ditemukan minimnya sarana dan prasarana di lingkungan perumahan dan pemukiman yang dapat menimbulkan kawasan tidak sehat, sedangkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk peraturan No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini memberikan tujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan pemukiman kumuh, mempertahankan kualitas perumahan dan pemukiman yang

¹²Gatot Murniatmo, *Pola Pemukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992),h. 7.

telah dibangun agar tetap terjaga serta mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu suatu penelitian secara cermat dalam menganalisis persoalan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh yang kemudian ditinjau menurut Fiqh Siyasah.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah hanya dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017.

E. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung?

¹³Peraturan daerah kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 Pasal 3.

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan informasi bagi masyarakat khususnya di perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.¹⁴ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap suatu gejala (penerapan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualits perumahan dan pemukiman kumuh) secara detail sesuai dengan kondisi yang terjadi.

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1998), h. 32.

¹⁵Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 4.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam hal ini data-data yang diperoleh langsung hasil wawancara dari kelompok kerja penanganan kawasan kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung serta kelompok swadaya masyarakat yang tinggal di daerah perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁶ Data yang diperoleh dari literatur dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, catatan kuliah dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

¹⁶J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 24.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁷ Dalam kegiatan ini akan melakukan wawancara dengan kelompok kerja penanganan kawasan kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.¹⁸ Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁹

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

297. ¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.

¹⁸*Ibid*, h. 118.

¹⁹*Ibid*, h. 300.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁰ Wawancara ini dilakukan terhadap pemerintah daerah yang berwenang terhadap tugas dalam penerapan peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017, yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹ Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen data.

c. Teknik Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 231.

²¹ *Ibid*, h. 210.

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²² Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.²³ Karena dalam proses editing mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematikasi Data

Sistematikasi data yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁴ Data yang dikumpulkan akan mengurutkan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 118.

²³ Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), h. 161.

²⁴ *Ibid*, h. 126.

data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

6. Prosedur Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.²⁵

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif. deduktif adalah menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang bersifat khusus kemudian mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

²⁵Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 44.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perspektif Fiqh Siyasah Tentang Kebersihan Lingkungan

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh berarti “paham yang mendalam”. Dalam kutipan Anir Syarifuddin, menurut Imam Al-Tirmidzi menyebut “fiqh tentang sesuatu” yang memiliki pengertian mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya.²⁶ Sudah diungkapkan sebanyak 20 kali kata “faqaha” dalam Al-Qur’an, 19 diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang telah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” mengenai hukum yang tidak pasti (*zhanni*).²⁷

Dapat dipahami bahwa pengertian fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga dapat disebut hukum Islam karena sifatnya *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut akhirnya mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi.

²⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993), h. 15.

²⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 3.

Arti kata siyasah adalah mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan yang diambil dari kata *sasa*.²⁸ Pengertian dari kata *sasa* mengisyaratkan bahwa siyasah bertujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.²⁹

Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah merupakan mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemashlahatan.³⁰ Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah, menurutnya siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Allah SWT.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 130 yang berbunyi:

²⁸Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108.

²⁹Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Da ral al-Anshar, 1977), h. 4-5.

³⁰Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 362.

³¹Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah), h. 16.

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ
 فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu ber-firman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan ber-firman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Khalifah atau pemimpin pasti akan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam segala hal, baik dalam hal agama dan dunia. Oleh karenanya, hal ini tidak dapat terpisah dari tugas seorang khalifah sebagai kepala negara bagi suatu negara bahkan agama. Perlunya pedoman bagi seorang Khalifah sebagai landasan yang mampu menjadikan suatu negara itu baik atau tidak, bukan saja dalam Islam, bahkan agama lain turut mengajarkan hal yang sama yaitu menjadi pemimpin yang adil dan mampu memerintah suatu negara dengan baik.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Para teoritis politik Islam biasanya mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Oleh karena demikian, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan.³²

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syari'at untuk mewujudkan kemashlahatan umat.³³

Dengan kata lain fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang

³² Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

³³ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.187.

diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³⁴

Beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan Hadist. Kedua sumber inilah yang menjadi pacuan bagi pemegang kekuasaan atau pemerintahan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Berdasarkan kedua sumber tersebut cukup terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, karenanya sumber atau acuan dalam menciptakan perundang-undangan pula terdapat pada manusia dan lingkungan itu sendiri. Sumber lain juga dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.³⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga, dalam diri setiap makhluk hidup dilengkapi dengan naluri

³⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

³⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945), h. 11.

mempertahankan hidup dan cenderung hidup kekal.³⁶ Islam mengajarkan kepada umat manusia agar dalam hidup dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai kehidupan. Menjaga keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah, material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi dan ukhrowi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.³⁷

Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan menjadi satu dengan perumahan, dengan adanya pembangunan perumahan tentunya lingkungan yang hijau yang masih alami akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sesuai dengan firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا

وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut*

³⁶Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), h. 163 .

³⁷Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 169.

*(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*³⁸

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan: 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً

مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأُنَاسِي كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan Rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

³⁸Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf AsySyarif Medinah Munawwarah,1990), h. 230.

Penjelasan dari Surah Al-Qur'an di atas adalah bahwa manusia haruslah selalu menjaga kelestarian lingkungan di muka bumi dan mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan Oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikannya. Serta merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan perkembangan kota menuju *Button Up Top Down* yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

Dalam Islam, bukan hanya membahas mengenai Ubudiyah dan Ilahiyah tetapi juga membahas mengenai kesejahteraan umat yang dibahas dan diatur dalam Islam, salah satu dalam bahasan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah dalam arti bahasa dimaknai sebagai teori yang membahas terkait konstitusionalitas Islam (Politik Islam). Ilmu fiqh mengetahui hukum Islam yang praktis melalui argumentasi yang rinci. Sedangkan siyasah adalah tata kelola, pengambilan keputusan, pengambilan kebijaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah tetapi perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsipil, perbedaan pendapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam kajian fiqh siyasah nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau menyebutkan ruang lingkup *fiqh siyasah* terdapat lima bidang, yaitu: *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara).³⁹
- b. Menurut Imam Ibn Taimiyyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasahal-Syar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah terdapat empat bidang yaitu *siyasah qadla`iyyah* (peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah*, *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁴⁰
- c. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf yang lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian dalam ruang lingkup fiqh siyasah, yaitu *siyasah qadla`iyyah*

³⁹Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Alamiyyah, 2006), h. 4.

⁴⁰*Ibid.*, h. 13.

(peradilan), *siyasah dauliyyah* (hubungan internasional), *siyasah maliyyah* (keuangan negara).⁴¹

- d. Menurut salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, menurut beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang berserta penjelasannya, yaitu *siyasah dusturiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum), *siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan), *siyasah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *siyasah 'idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara), *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang), *siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan).⁴²

Ruang lingkup fiqh siyasah secara keseluruhan dapat dikelompokkan dengan tiga kelompok, yaitu:⁴³

- a. *Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri), bagian ini telah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum

⁴¹ *Ibid.*

⁴² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.15-16.

perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.

- b. *Siyasah Maliyyah* (keuangan dan moneter), pada bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
- c. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), bagian ini meliputi kajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang disiplin ilmu fiqh yang memiliki sumber-sumber kajian yang dapat dijadikan pedoman umat manusia. Secara umum sumber fiqh siyasah terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi

⁴⁴Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah), h. 12-27.

studi yang dinamis, antisipasif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Berdasarkan penjelasan beberapa pembagian ruang lingkup fiqh siyasah di atas maka dapat diketahui dalam pembahasan skripsi ini masuk dalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah.

Siyasah dusturiyyah secara global membahas hubungan antara pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemashlahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah dusturiyyah tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Fiqh siyasah dusturiyyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.⁴⁵ Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. Siyasah dusturiyyah ini meliputi sebagai berikut:

- a. *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (peraturan tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam).

⁴⁵Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 67.

- b. *Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah* (peraturan tentang peradilan yang sesuai dengan syariat Islam)
- c. *Siyasah idariyah syar'iyyah* (peraturan tentang administrasi negara yang sesuai dengan syariat Islam).
- d. *Siyasah tanfidzyah syari'ah* (peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).⁴⁶

Dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji perundang-undangan negara dengan kajiannya berupa konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian tersebut membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁷ Objek kajian fiqh siyasah adalah bagaimana hubungan antara pemerintahan dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemashlahatan bersama.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 53.

3. Kebersihan lingkungan dalam perspektif fiqh siyasah

Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda, seperti air itu bersih, lingkungan bersih, tangan bersih dan sebagainya. Terkadang, kata bersih memberikan pengertian suci, seperti air itu suci, tetapi biasanya kata bersih digunakan untuk ungkapan sifat lahiriah sedangkan kata suci untuk ungkapan sifat batiniah, seperti jiwanya suci. Tidak semuanya yang bersih adalah suci.⁴⁸ Suci yaitu bersih dalam arti keagamaan, seperti tidak terkena najis, bebas dari dosa, atau bebas dari suatu barang dari mutanajis, najis dan hadas. Sedangkan bersih berarti terbebasnya manusia atau suatu barang dari kotoran. Alat utama untuk bersuci dari najis dan bersuci dari hadas adalah air.

Dalam fikih disebutkan bahwa tidak semua yang suci dapat menyucikan contohnya yaitu air. Air yang suci dan menyucikan yaitu air yang masih asli belum berubah warnanya, baunya atau rasanya (seperti air hujan, air sumur dan sebagainya), air yang suci tetapi tidak menyucikan yaitu air bersih yang telah tercampur dengan suatu zat sehingga warnanya atau baunya atau rasanya sudah tidak dapat lagi disebut air biasa atau air mutlak (seperti air teh, air kopi, dan sebagainya), air seperti itu walaupun suci namun tidak menyucikan.⁴⁹

⁴⁸Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam tentang Bersih dan Implikasinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 1993), h. 12.

⁴⁹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 4.

Terkadang bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniah seperti jiwa suci. Dalam membahas perkara kebersihan dalam agama Islam digunakan tiga macam istilah, yaitu:

- a. Nazafah (nazif) secara bahasa yaitu kebersihan lawan dari kata kotor. Berasal dari kata Nazufa-yanzufu-nazafatan. Nazafah yaitu kebersihan tingkat pertama, yang meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat pembersihnya benda yang bersih, antara lain air.⁵⁰
- b. Taharah secara bahasa yaitu menyucikan atau membersihkan. Berasal dari kata Tahara-yathuru-tuhan wa taharatan. Taharah mengandung pengertian yang lebih luas yakni meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah.⁵¹
- c. Tazkiyah secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan, berasal dari kata *zakka-yuzakki-tazkiyah*. Tazkiyah mengandung arti ganda, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat (perbuatan) tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji.⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا

⁵⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1435.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ
 أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ
 لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”

Salah satu cara yang dianjurkan oleh Islam dalam memelihara kesehatan adalah menjaga kebersihan. Sikap Islam terhadap kebersihan sangat jelas dan di dalamnya terkandung nilai ibadah kepada Allah swt. Sesungguhnya kitab-kitab syariat Islam selalu diawali dengan bab al-

Taharah (bersuci), yang merupakan kunci ibadah sehari-hari.⁵³

Dalam agama Islam, ajaran tentang kebersihan menyangkut berbagai hal, antara lain :

- a. Kebersihan rohani: Ajaran kebersihan mendasar adalah menyangkut kebersihan rohani.
- b. Kebersihan badan: Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badan.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang”

- c. Kebersihan tempat: Ajaran kebersihan juga menyangkut kebersihan tempat melaksanakan ibadah atau sarana peribadatan. Mesjid sebagai tempat suci, dimana kaum Muslimin melakukan ibadah harus dipelihara kesucian dan kebersihannya karena ibadah shalat tidak sah jika dikerjakan di tempat yang tidak bersih atau kotor.

⁵³Departemen Agama, *Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h. 183.

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ تَطَيُّفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ
كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَتَطَفَّؤْا أَفَيَسْتَكْمُ (رواه
الترمذی)

Artinya: "Dari Sa'id: *Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Baik yang menyintai kebaikan, Maha Bersih yang menyintai kebersihan, Maha Mulia yang menyintai kemuliaan, Maha Pemurah yang menyintai kemurahan. Oleh karena itu bersihkanlah halaman dan pekarangan rumahmu* ". (Hadits riwayat Tirmidzi).

- d. Kebersihan pakaian: Kebersihan pakaian sangat penting, karena pakaian melekat pada badan yang berfungsi menutup aurat, melindungi badan dari kotoran dan penyakit serta memperindah badan, maka ajaran Islam menyatukan antara kebersihan badan dan kebersihan pakaian.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ٥

Artinya: "Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah".

- e. Kebersihan lingkungan: Ajaran Islam memandang penting kebersihan lingkungan hidup, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Agama Islam

menghendaki dari umatnya kebersihan yang menyeluruh.⁵⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طُرُقِ النَّاسِ (رواه أحمد ومسلم وأبو داود)

Artinya: *"Dari Abi Hurairah: Takutlah akan dua hal yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya: "Apakah dua hal yang mendatangkan laknat itu wahai Rasulullah? Bersabda Nabi: "Ialah buang hajat/kotoran di jalan tempat lewat manusia atau di tempat manusia berteduh". (Hadits riwayat Ahmad Muslim dan Abu Daud).*

Ahmad Syauqi al-Fanjari mendefinisikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan.⁵⁵

Menurut Yusuf al-Qardhawi kebersihan adalah salah satu unsur penting dalam perilaku beradab. Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah. Karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim.⁵⁶ Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi ia menyebutkan bahwa perhatian al-


⁵⁴Kebersihan Menurut Ajaran Islam, (On-line), tersedia di: <http://juaria.blogspotcom.blogspotcom/2011/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.html>

⁵⁵Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 9.

⁵⁶Yusuf Al-Qaradhwai, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Penerjemah Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 361.

sunnah al-Nabawiyah terhadap kebersihan muncul di karenakan beberapa sebab, yaitu:

Pertama, sesungguhnya kebersihan adalah sesuatu yang disukai Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 222:


 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ⁵⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*”

Kedua, kebersihan adalah cara untuk menuju kepada kesehatan badan dan kekuatan. Sebab hal itu merupakan bekal bagi tiap individu. Disamping itu, badan adalah amanat bagi setiap muslim. Dia tidak boleh menyianyiakan dan meremehkan manfaatnya, jangan sampai dia membiarkan badannya diserang oleh penyakit.

Ketiga, kebersihan itu adalah syarat untuk memperbaiki atau menampakkan diri dengan penampilan yang indah yang dicintai oleh Allah swtdan Rasul-Nya.

Keempat, kebersihan dan penampilan yang baik merupakan salah satu penyebab eratnya hubungan seseorang dengan orang lain. Ini karena orang sehat dengan fitrahnya tidak menyukai sesuatu yang kotor dan tidak suka melihat orang yang tidak bersih.⁵⁷

⁵⁷*Ibid.*, h. 365-367.

Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana kesehatan merupakan nikmat Allah yang senantiasa harus kita syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan.

B. Kebersihan Lingkungan Menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemukiman Kumuh

1. Pengertian Kebersihan Lingkungan

Kebersihan lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber dan lainnya. Hal ini dapat tercapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih indah dan nyaman.

Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya, debu, sampah, dan bau. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain:

- a. Terhindar dari penyakit yang di sebabkan dari lingkungan yang tidak sehat.
- b. Lingkungan menjadi lebih sejuk.
- c. Bebas dari polusi udara.
- d. Air menjadi lebih bersih dan aman untuk di minum.
- e. Lebih tenang dalam menjalankan aktifitas sehari hari.

58

Terdapat banyak lagi manfaat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka dari itu kita wajib menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri misalnya rajin menyapu halaman rumah, rajin membersihkan selokan rumah kita, membuang sampah pada tempatnya, pokoknya masih banyak lagi. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini, di sekolah pun kita diajarkan untuk selalu hidup bersih.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung wajib menjamin tersedianya kawasan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat yang merupakan salah satu indikator tercapainya kesejahteraan

⁵⁸Pemerintah Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Buleleng, *Kerbersihan Lingkungan*, (Buleleng: Website Resmi Dinas Perumahan,2020), (On-line), tersedia di: <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>.

masyarakat. Dengan adanya ketetapan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.⁵⁹

Berdasarkan pertimbangan pemerintah Provinsi Lampung untuk menanggulangi hal ini agar masalah kawasan permukiman yang kumuh maka dibuatlah peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, didalam peraturan daerah ini pada bab II pasal 3 memberikan tujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh, mempertahankan kualitas perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga serta mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni.⁶⁰

⁵⁹Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017, *Menimbang:*

⁶⁰Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Pasal 3.

2. Pengertian Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi pembangunan sektor perumahan dan permukiman.

Salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.⁶¹

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.⁶²

Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus dalam Wesnawa bukunya dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti kelompok rumah.

Perumahan menurut Sadana adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.⁶³

⁶¹Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang pencegahan perumahan dan pemukiman Bab I Pasal 1 ayat (9).

⁶²Ibid., Pasal 1 Ayat (10)

⁶³F. Fansuri “Pengertian perumahan dan pemukiman” (On-line), tersedia di: <http://repository.unpas.ac.id>

Apabila dilihat dari perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah.

3. Kriteria dan Tipologi Perumahan dan Pemukiman Kumuh

a. Kriteria Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan kriteria dasar perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yakni: “Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman”.⁶⁴ Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

⁶⁴Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang pencegahan perumahan dan pemukiman Bab III Pasal 5 Ayat (1)

- 1) Bangunan gedung.
- 2) Jalan lingkungan.
- 3) Penyediaan air minum.
- 4) Drainase lingkungan.
- 5) Pengelolaan air limbah.
- 6) Pengelolaan persampahan.
- 7) Proteksi kebakaran.
- 8) Ruang terbuka hijau.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mencakup:

- 1) Ketidakteraturan bangunan
- 2) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- 3) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan, “Ketidak teraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman yang:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
- 2) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling,

bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- 3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- 4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.⁶⁵

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- 1) Pengendalian dampak lingkungan.
- 2) Pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- 3) Keselamatan bangunan dan kesehatan bangunan.
- 4) Kenyamanan bangunan.
- 5) Kemudahan bangunan.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) mencakup:

- 1) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.
- 2) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

⁶⁵*Ibid.*

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud adalah kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud adalah kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mencakup:

- 1) Tidak tersedianya akses aman air minum.
- 2) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.

Ketidak tersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) mencakup:

- 1) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.
- 2) Ketidaktersediaan drainase.
- 3) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
- 4) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya.
- 5) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana

dimaksud merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- 1) Pemeliharaan rutin.
- 2) Pemeliharaan berkala.

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.⁶⁶

b. Tipologi Perumahan dan Pemukiman Kumuh

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

- 1) di atas air.
- 2) di tepi air.
- 3) di dataran.
- 4) di perbukitan.

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud yaitu harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 6-14

tata ruang. Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sebagai landasan untuk melakukan penelitian, yang dimana penelitian-penelitian itu digunakan guna membandingkan hasil penelitiannya. Dalam penulisan skripsi ini maka mengacu pada penelitian atau skripsi-skripsi yang juga membahas mengenai tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, sebagai berikut:

Skripsi Anisa Rizki dengan judul “Inovasi Kebijakan Penataan Lingkungan Dan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Pada Masalah Sampah Di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” pada tahun 2019. Skripsi dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Pada skripsi ini membahas mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Bumi Waras belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Karena Kelurahan Bumi Waras belum mampu melakukan pengangkutan sampah dan persentase pengangkutan sampahnya di bawah 50% dari timbulan sampah yang dihasilkan.

Skripsi Muhammad Ayat dengan judul “Studi Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman Di Kota Sinjai (Studi Kasus: Kelurahan Lappa Kabupaten Sinjai)” pada tahun 2017. Skripsi dari fakultas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Pada skripsi ini membahas Permasalahan pada turunnya kualitas lingkungan seperti jalan, drainase, air minum dan persampahan yang tidak terpelihara dengan baik banyak terjadi di lingkungan perkotaan. Sama halnya dengan kondisi lingkungan di Kelurahan Lappa. Kondisi eksisting saat ini pada Kelurahan Lappa kondisi permukiman tidak teratur (semraut) sedangkan untuk kondisi prasarana dasar seperti drainase lingkungan yang masih terjadi genangan dikarenakan masih terdapatnya jalan yang belum memiliki drainase lingkungan, jalan lingkungan yang buruk, sistem persampahan yang tidak memadai, dan pengelolaan air bersih yang tidak memadai.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang disebutkan diatas, pada penelitian yang ditulis oleh Anisa Riski mempunyai persamaan tentang daerah yang diteliti yaitu Kota Bandar Lampung. Perbedaan antara skripsi ini adalah membahas tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh sedangkan skripsi Anisa Riski membahas tentang pengelolaan sampah.

Persamaan pada skripsi Muhammad Ayat adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan kualitas

perumahan. Sedangkan perbedaanya terdapat pada letak penelitian, Muhammad Ayat meneliti di Kabupaten Binjai sedangkan skripsi ini meneliti di daerah Kota Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Terjemah, Jakarta: Mujamma' Al Malik Fadh Li Tiba'at Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah, 1990.

Departemen Agama, *Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

BUKU

Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006).

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya: 1993).

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press, 1945).

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-empat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah).

Gatot Murniatmo, *Pola Pemukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Ibn Manzhur, *Lisan al 'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968).

Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: al-Muassasah al-'Arabiyyah).

Ibnu Mazhur, *Lisan al-'Arab*, Jus 6, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Semarang: CV Diponegoro, 2001.

Suparno Sastra, Endy Marlina, *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*, Yogyakarta: Andi, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

- Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991).
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020).
- Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Teras, 2012).
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014).
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis I: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Penerjemah Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).

UNDANG-UNDANG

- Peraturan daerah kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Pemukiman Kumuh.
- Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor. 41 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung

JURNAL

Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam tentang Bersih dan Implikasinya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 1993).

Pemerintah Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Buleleg, *Kebersihan Lingkungan*.

Skripsi Anisa Rizki, *Inovasi Kebijakan Penataan Lingkungan dan Permukiman Berbasis Komunitas*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).

Skripsi Muhammad Ayat, *Studi Peningkatan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman di Kota Sinjai*, (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

INTERNET

Pemerintah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Buleleng, *Kerbersihan Lingkungan*, (Buleleng: Website Resmi Dinas Perumahan, 2020), (On-line), tersedia di: <https://disperkimta.bulelengkab.go.id>.

F. Fansuri “Pengertian perumahan dan pemukiman” (On-line), tersedia di: <http://repository.unpas.ac.id>

Kebersihan Menurut Ajaran Islam, (On-line), tersedia di: <http://juaria-blogspotcom.blogspotcom/2011/05/kebersihan-menurut-ajaran-islam.html>

WAWANCARA

Dokumentasi Hasil Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 9 September 2020.

Wawancara, Bapak Ahmad Arief Muharram, S.H, M.M kepala bidang Perumahan dan Tata Bangunan pada tanggal 7 September 2020.

Wawancara, Bapak Rudi Agung Wijaya, S.E, M.M kepala bidang Perumahan dan Tata Bangunan pada tanggal 7 September 2020.